



Mantan Kadis Pertanian Masuk Bui Lagi

AMLAPURA, TRIBUN BALI - Mantan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holikultura (DPTPH) Karangasem, I Komang Subrata Yasa, yang terjerat kasus korupsi pengadaan pupuk kembali ditahan pertengahan Februari bulan lalu. Mahkamah Agung (MA) menambah masa hukumannya menjadi 4,5 tahun.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Amlapura, Bekti Wicaksono mengatakan, Subrata Yasa yang divonis hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta oleh Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sempat mehirup udara bebas sebulan mulai pertengahan Januari hingga Februari ini.

"Dia (Subrata) bebas karena masa hukuman yang diputuskan PN Tipikor

habis. Dieksekusi lagi setelah putusan MA," ungkap Bekti, Jumat (17/3).

Pertengahan Februari 2017, MA mengeluarkan putusan kasasi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk tahun 2013 tersebut. Hukuman Subrata yang awalnya hanya satu tahun pun menjadi 4,5 tahun. Artinya, ia akan menjalani masa hukuman 3,5 tahun lagi.

"Keputusan MA lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Sebulan lepas dari penjara Subrata ditahan kembali karena ada putusan kasasi dari MA. Sekarang Subrata sudah di lapas," ujar dia.

JPU tidak puas dengan putusan yang mengancam hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk

di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holikultura Pemda Karangasem tersebut.

JPU memutuskan mengajukan banding dan menempuh kasasi. Hasilnya, MA menambah hukuman Subrata Yasa menjadi 4,5 tahun. Terkait kerugian negara yang mencapai Rp 418 juta, dibebankan kepada Hamdani yang menjadi rekanan dalam kasus tersebut.

Kejari Amlapura mencium adanya monopoli dan markup. Harga pupuk yang semula Rp 400 per kilo dinaikkan menjadi Rp 2.200. Pengadaan pupuk menggunakan dana APBD Induk sebesar Rp 300 juta dan APBD Perubahan Rp 500 juta. Pupuk yang dibeli sekitar 500 ton diberikan kepada delapan kelompok tani di empat kecamatan di Karangasem. (ful)

Edisi : Senin, 20 Maret 2017

Hal : 4



Realisasi Hibah Bansos Carut-marut

SINGARAJA, NusaBali

DPRD Kabupaten Buleleng menilai proses realisasi dana hibah bansos pada kelompok masih carut-marut. Antara petunjuk yang diberikan dengan realisasinya di tingkat OPD terkait, tidak nyambung. Hal itu terungkap ketika anggota DPRD Buleleng, untuk pertama kali menyampaikan hasil resesnya di hadapan seluruh pimpinan OPD lingkup Pemkab Buleleng, Jumat (17/3).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, sedangkan dari eksekutif dipimpin Asisten I Setkab Buleleng Made Arya Sukerta.

Ketua Komisi I, Putu Mangku Mertayasa menyatakan, pencairan hibah bansos harus ada panduan yang jelas sehingga ada persamaan persepsi dikalangan OPD. Karena banyak keluhan yang disampaikan kelompok masyarakat saat reses, terutama menyangkut calon penerima.

"Contoh carut marutnya itu ada di bagian indikator penerima. Apakah objeknya atau kegiatannya, yang bisa menerima bantuan. Bagian hukum harus memberikan

verifikasi dan evaluasi yang tegas, sehingga jelas, tidak lagi muncul multitafsir dalam mengarahkan calon penerima bantuan," katanya.

Menurut politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Banjar ini, sering terjadi antara petunjuk dengan pelaksanaannya tidak sama, yang berdampak pada kekecewaan calon penerima karena harus bolak-balik memperbaiki proposal. Disebutkan, pembuatan proposal sudah ada petunjuk teknis (Juknis) sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2016, tetapi terkadang di tingkat pelaksanaan tidak sama dalam memberikan petunjuk. "Yang kami inginkan juknis ini harus mengikat kita, baik si penerima dan juga OPD. Tetapi pelaksanaan sering tidak sesuai sehingga membikin bingung calon penerima," ungkapny.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi I Wayan Masdana. Menurut Pria yang akra disapa Anok ini, calon penerima hibah bansos sering dipersulit ketika berhadapan dengan OPD terkait yang merealisasikan bantuan. Ia pun meminta agar masing masing OPD bisa memberikan penjelasan

terkait dengan syarat administrasi pencairan bantuan. "Bansos itu kapan sebenarnya bisa dicairkan, saya minta masing masing OPD bisa kooperatif untuk memberikan penjelasan. Kalaupun memang ada kesalahan, mohon yang mengurus itu bisa dijelaskan, dan bisa membantu, supaya tidak bolak-balik, untuk proses pencairannya," ujarnya.

Sementara Asisten I Setda Buleleng Made Arya Sukerta mengapresiasi masukan yang disampaikan para wakil rakyat. Ia beralih persoalan yang dihadapi masyarakat sebagai calon penerima bantuan hibah bansos hanya terkait masalah teknis khususnya masalah administrasi. Terkait dengan indikator penerima, dalam aturan jelas mengatur bahwa indikatornya itu adalah kegiatan.

"Itu jelas bukan pada kelompok penerima, namun kegiatan yang dilaksanakan. Karena nanti hibah itu masuk ke OPD berupa program. Ketika ada hibah dalam bentuk bangunan, kan harus dipastikan harus bagus. Kalau tidak instansi teknis yang ditempatkan disana, ya kontrolnya jadi lemah dong," jelasnya. **k19**

Edisi : Sabtu, 18 Maret 2017

Hal : 4